

**OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI SOSIAL MELALUI
PENDAMPINGAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO**

Muhammad Miftakhul Huda¹, Muhammad Roisul Basyar²

^{1, 2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Miftahulhuda095@gmail.com, roisulbasyar@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Magang merupakan proses pembelajaran berbasis praktik yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk memahami dinamika kerja birokrasi di instansi pemerintah. Artikel ini membahas kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pada optimalisasi pelayanan administrasi sosial melalui pendampingan pemutakhiran data keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas data yang menjadi dasar dalam perencanaan program keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Selama kegiatan magang, mahasiswa terlibat langsung dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan input data keluarga ke dalam sistem administrasi yang digunakan oleh bidang Keluarga Berencana Ketahanan Keluarga (KBKK). Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam mendampingi petugas lapangan untuk memastikan akurasi data serta membantu mempercepat proses pemutakhiran yang masih dilakukan secara bertahap. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya ketelitian administrasi, koordinasi antarbidang, dan peran teknologi dalam pelayanan publik yang efektif. Dari kegiatan ini, mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam administrasi sosial, pengelolaan data, serta komunikasi pelayanan publik. Pendampingan yang dilakukan turut membantu DP3AKB dalam memperbaiki alur kerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi berbasis data. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini tidak hanya memperkuat kemampuan profesional mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi pelayanan sosial yang lebih transparan dan akurat di lingkungan pemerintahan daerah.

Kata kunci : Magang, DP3AKB Sidoarjo, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, Administrasi Sosial, Pemutakhiran Data, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Internship is a practice-based learning activity that provides students with direct experience in understanding the dynamics of bureaucratic work within government institutions. This article discusses the internship program conducted at the Department of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of Sidoarjo Regency, focusing on optimizing social administration services through mentoring in family data updating. The main objective of this activity is to support the improvement of data quality, which serves as the foundation for planning family planning and family resilience programs. During the internship, students were directly involved in the process of collecting, verifying, and inputting family data into the administrative system used by the Family Planning and Family Resilience Division. In addition, students assisted field officers to ensure data accuracy and helped accelerate the updating process that was still carried out in stages. This experience provided a deeper understanding of the importance of administrative accuracy, inter-departmental coordination, and the role of technology in achieving effective public service delivery. Through this internship, students developed practical skills in social administration, data management, and public communication. The mentoring activities also contributed to improving DP3AKB's workflow efficiency and strengthening data-based public services. Overall, this internship not only enhanced students' professional competence but also made a real contribution to optimizing transparent and accurate social administration services in local government institutions.

Keywords: Internship, DP3AKB Sidoarjo, Family Planning and Family Resilience, social administration, data update, public service.

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi sosial merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Administrasi sosial

memiliki kaitan kuat dengan proses pendataan, pemutakhiran informasi, serta penyediaan layanan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan data keluarga yang akurat menjadi komponen vital dalam proses perencanaan kebijakan publik, terutama program yang berkaitan dengan keluarga, ketahanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan (Herizal et al., 2020). Keakuratan data tidak hanya berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas berbagai program pemerintah.

Pelayanan administrasi sosial memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga dan ketahanan sosial. Di era digital saat ini, data menjadi elemen vital dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi program pemerintah. Oleh karena itu, keakuratan dan keterbaruan data keluarga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan efektivitas kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan program keluarga berencana dan pembangunan kesejahteraan keluarga.

Menurut Sidik (2015), pembangunan berbasis data merupakan syarat utama bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam era digital saat ini, data menjadi sumber daya strategis yang memungkinkan birokrasi bekerja dengan lebih efisien. Digitalisasi administrasi memberi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem informasi yang terkomputerisasi, terstruktur, dan dapat diakses secara cepat. Hal ini selaras dengan tuntutan modernisasi birokrasi sebagaimana dijelaskan Irtanto (2020), bahwa transformasi birokrasi pada abad ke-21 menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki mandat besar dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi sosial yang berkaitan dengan perencanaan keluarga, ketahanan keluarga, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Salah satu program unggulan yang memerlukan akurasi data tinggi adalah pemutakhiran data keluarga. Program ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara kondisi riil masyarakat dengan data administratif yang tersimpan dalam sistem pemerintah daerah. Pentingnya validitas data ditegaskan oleh Iskandar et al. (2021), bahwa pengelolaan data yang baik merupakan pilar utama dalam penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kualitas pembangunan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pelayanan administrasi sosial yang optimal melalui pengelolaan data keluarga secara akurat dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah kegiatan pendampingan pemutakhiran data keluarga, yang bertujuan untuk memperbaiki validitas data, memperbarui informasi, serta memastikan bahwa setiap keluarga tercatat sesuai dengan kondisi terkini.

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa di DP3AKB Sidoarjo menjadi sarana pembelajaran yang menghubungkan teori dan praktik dalam dunia administrasi publik. Melalui magang, mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana proses birokrasi bekerja, mulai dari pengelolaan dokumen, input data keluarga, verifikasi administrasi, hingga koordinasi dengan petugas lapangan. Kegiatan ini sejalan dengan konsep experiential learning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman nyata yang memungkinkan mahasiswa menerapkan teori administrasi publik dalam situasi praktis (Kolb, 2014).

Kegiatan magang di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana proses administrasi sosial dijalankan dalam konteks birokrasi pemerintahan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan pemutakhiran data keluarga, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teknis input dan verifikasi data, tetapi juga mengasah kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat serta bekerja sama dengan petugas lapangan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pelayanan administrasi sosial bukan sekadar proses administratif, melainkan juga bentuk nyata dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.

Pendampingan pemutakhiran data keluarga yang dilakukan mahasiswa menunjukkan implementasi prinsip Good Governance. Sururi (2019) menyatakan bahwa Good Governance mencakup nilai

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik. Seluruh prinsip ini tercermin dalam proses pemutakhiran data keluarga, di mana mahasiswa berperan membantu aparat pemerintah melakukan verifikasi informasi, menyesuaikan format pelaporan, serta menyusun dokumen administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, proses administrasi yang dilakukan mahasiswa merefleksikan penerapan pendekatan New Public Management (NPM). NPM mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip efisiensi, orientasi hasil, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi publik (Osborne & Gaebler, 1992). Penggunaan Excel, aplikasi internal DP3AKB, serta format digital lainnya dalam pemutakhiran data keluarga menandakan bahwa sektor pelayanan sosial juga bergerak menuju birokrasi modern, sebagaimana diuraikan Irtanto (2020) mengenai pentingnya transformasi digital dalam reformasi pelayanan publik.

Selain itu, magang ini menjadi sarana pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik, di mana mahasiswa dapat menerapkan konsep administrasi publik, pelayanan masyarakat, dan manajemen data ke dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem administrasi, membantu proses pemutakhiran data yang sebelumnya masih manual, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Azhari et al. (2023) juga menegaskan bahwa digitalisasi data dalam lembaga publik tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menciptakan transparansi dan integritas data yang lebih baik. Ketika pemerintah daerah mampu mengelola data keluarga secara tepat dan mutakhir, maka proses perencanaan dan evaluasi program keluarga berencana, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Selain pendekatan Good Governance dan NPM, kegiatan ini juga dapat dikaitkan dengan paradigma New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003) yang menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengendali (steering), tetapi sebagai pelayan publik (serving). Pendampingan pemutakhiran data keluarga mencerminkan paradigma tersebut karena berfokus pada upaya memberikan pelayanan administratif yang berkualitas kepada masyarakat melalui data yang valid dan sistem kerja yang kolaboratif.

Dengan adanya kegiatan pendampingan pemutakhiran data keluarga, diharapkan pelayanan administrasi sosial di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih optimal. Melalui kegiatan ini pula, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang sosial dan keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata, mendalam, dan sistematis mengenai pelaksanaan kegiatan magang serta pengalaman yang diperoleh selama mendampingi proses pemutakhiran data keluarga di Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Metode ini dianggap relevan karena kegiatan magang tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi juga mencakup interaksi sosial, koordinasi kerja antarpegawai, serta penerapan keterampilan teknis dalam proses pelayanan berbasis data. Dengan demikian, hasil magang dapat dijelaskan secara lebih nyata, baik dari sisi proses, kendala, maupun hasil yang dicapai selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan magang dilaksanakan di lingkungan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, tepatnya pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. Bidang ini menjadi pusat pelaksanaan administrasi data keluarga serta pengelolaan program ketahanan keluarga di daerah. Magang dilaksanakan selama dua bulan,

dimulai pada 14 Juli hingga 29 Agustus 2024. Selama periode tersebut, mahasiswa ditempatkan di ruang kerja bidang KB-KK untuk berpartisipasi langsung dalam proses administrasi, input data, serta mendukung kegiatan pendampingan kepada petugas lapangan. Fokus utama kegiatan magang adalah membantu proses pendampingan pemutakhiran data keluarga. Pendampingan ini mencakup pembaruan data keluarga di sistem administrasi, verifikasi terhadap data yang belum valid, serta pencocokan antara data lapangan dengan data digital yang tersimpan di database DP3AKB. Mahasiswa turut membantu operator dan petugas KB dalam memastikan data yang diinput telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Dengan cara ini, proses pemutakhiran menjadi lebih cepat, akurat, dan terpantau secara menyeluruh.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mengumpulkan data keluarga hasil pendataan lapangan, membantu proses validasi dan verifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi sistem informasi keluarga, serta menyusun laporan hasil pembaruan data. Mahasiswa juga mendampingi petugas lapangan saat melakukan koordinasi dengan kader KB di wilayah binaan, sekaligus belajar memahami prosedur kerja yang berlaku dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai pentingnya ketelitian dalam administrasi sosial, komunikasi koordinatif, serta tanggung jawab dalam menjaga keakuratan data publik. Dalam pelaksanaan magang, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pegawai di bidang KB-KK, wawancara informal dengan petugas dan staf lapangan, serta dokumentasi berupa catatan kegiatan, laporan hasil kerja, dan foto kegiatan magang.

Observasi dilakukan setiap hari selama berada di kantor, sedangkan wawancara dilakukan secara spontan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kendala dan solusi dalam proses pemutakhiran data. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti sekaligus bahan evaluasi dari setiap tahapan yang telah dilakukan. Data yang diperoleh selama magang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah sederhana, dimulai dari proses reduksi data, penyajian hasil kegiatan, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan pengalaman dan temuan di lapangan. Analisis ini membantu menggambarkan sejauh mana pelaksanaan magang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan administrasi sosial di DP3AKB, khususnya dalam mendukung perbaikan sistem pendataan keluarga yang lebih akurat, efisien, dan transparan.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan magang ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses birokrasi publik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung tugas pegawai DP3AKB. Pendekatan ini memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat sekaligus menumbuhkan pemahaman bahwa pelayanan publik yang baik selalu berawal dari data yang valid, kerja sama tim yang solid, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas administrasi sosial di tingkat daerah.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Fokus utama kegiatan adalah pendampingan dalam proses pemutakhiran data keluarga sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan administrasi sosial di lingkungan instansi. Kegiatan dilaksanakan selama tujuh minggu mulai 14 Juli sampai 29 Agustus 2025, dengan keterlibatan langsung mahasiswa dalam aktivitas administrasi, pendataan, dan pengelolaan dokumen program Bangga Kencana. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa menjalankan berbagai kegiatan administratif mulai dari penyesuaian diri, pengelolaan dokumen SPJ, pemeriksaan data program keluarga berencana, hingga verifikasi data Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penginputan dokumen SPJ Sub Kegiatan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana, pemeriksaan data program keluarga berencana, hingga verifikasi data Kampung Keluarga Berkualitas. Melalui proses tersebut, mahasiswa mendukung aparatur dalam mempercepat validasi dan memperkecil kemungkinan kesalahan input data. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, inovasi, dan orientasi hasil dalam pelayanan publik (Irtanto, 2020).

Pengalaman ini memberikan pemahaman langsung mengenai bagaimana proses pendataan keluarga dilakukan, serta pentingnya keakuratan data untuk mendukung kebijakan pembangunan keluarga. Selanjutnya, mahasiswa terlibat dalam verifikasi laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Nonfisik, serta merekap kegiatan kelompok POKTAN dan IMP. Kegiatan ini memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana publik. Mahasiswa juga membantu dalam pengumpulan dan pengarsipan dokumen laporan pernikahan, rekapitulasi berita acara hasil rapat Pokja Kampung KB, serta verifikasi data Kampung Keluarga Berkualitas dan peserta program MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Melalui proses ini, mahasiswa mendampingi pegawai dalam memastikan bahwa setiap data keluarga yang masuk sudah diperbarui dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Pendampingan ini terbukti membantu mempercepat proses validasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya duplikasi atau kesalahan input data. Dengan demikian, pelayanan administrasi sosial yang dilakukan DP3AKB menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dari hasil kegiatan tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi sosial di DP3AKB masih menghadapi beberapa kendala

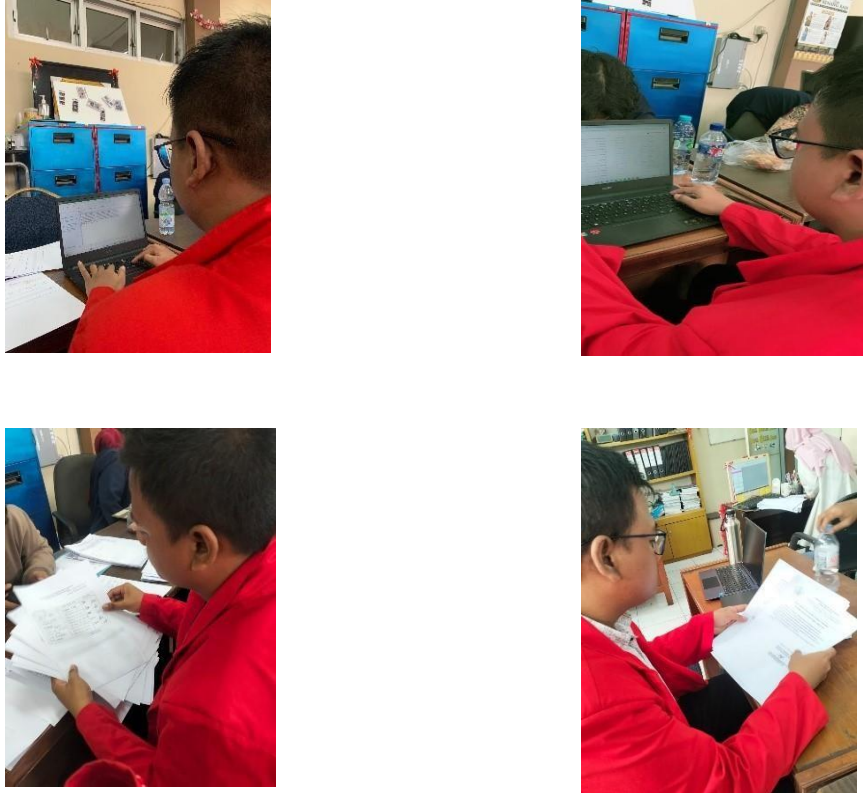
Di antaranya adalah perbedaan format pelaporan antar kecamatan, keterlambatan pengumpulan data dari kader lapangan, serta terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan data digital. Namun melalui pendampingan intensif, mahasiswa membantu memperbaiki format rekap, menyesuaikan data dalam satu sistem pelaporan, dan menata dokumen agar lebih mudah diakses oleh bagian administrasi. Hasil pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan keteraturan administrasi dalam bidang KB. Data yang sebelumnya belum tersusun dengan baik kini telah direkap berdasarkan kecamatan, bulan, dan tahun.

Selain itu, laporan kegiatan lapangan dapat diselesaikan lebih cepat karena mahasiswa membantu dalam proses pemeriksaan kelengkapan berkas dan sinkronisasi data. Selain itu, kegiatan magang ini juga mencerminkan penerapan Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik (Sururi, 2019). Pendampingan data keluarga tidak hanya membantu meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah daerah. Data yang valid berperan penting dalam proses perencanaan dan evaluasi program keluarga berencana yang berkelanjutan.

Dari perspektif pelayanan publik, pendampingan ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial yang efektif (Herizal et al., 2020). Hal ini sejalan dengan pendekatan *Serving rather than steering*, di mana birokrasi publik dituntut untuk melayani kebutuhan masyarakat secara adaptif dan profesional. Secara keseluruhan, hasil magang menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan pemutakhiran data keluarga berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data, efisiensi kerja pegawai, serta penguatan prinsip tata kelola yang baik dalam birokrasi daerah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman akademik mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi DP3AKB dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berbasis data (Azhari et al., 2023).

Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi instansi

dalam meningkatkan kualitas data dan pelayanan, tetapi juga memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana teori administrasi publik diimplementasikan secara nyata. Pendampingan ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan, akurasi data keluarga, serta memperkuat praktik good governance dalam pengelolaan pelayanan sosial di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Magang Pengarsipan Data dan Dokumen

KESIMPULAN

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dengan tema “Optimalisasi Pelayanan Administrasi Sosial melalui Pendampingan Pemutakhiran Data Keluarga” telah memberikan hasil nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pelayanan sosial di bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Pelaksanaan magang menunjukkan bahwa proses pendampingan dalam pemutakhiran data keluarga berperan penting dalam memperkuat kualitas data sebagai dasar perencanaan program pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa turut membantu aparatur dalam penyusunan, penginputan, dan verifikasi data keluarga sehingga sistem administrasi menjadi lebih tertib, akurat, dan mudah diakses. Pendampingan yang dilakukan selama tujuh minggu berhasil meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan dokumen SPJ, laporan kegiatan, serta data Kampung Keluarga Berkualitas dan peserta program MKJP.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman mahasiswa tentang implementasi teori administrasi publik dalam praktik, terutama nilai-nilai Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja administrasi DP3AKB, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran

yang relevan bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teori administrasi publik, manajemen data, dan pelayanan sosial secara langsung di instansi pemerintahan.

SARAN

Saran untuk DP3AKB Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan pelatihan bagi aparatur dan kader agar pengelolaan data keluarga dapat dilakukan dengan lebih teliti dan cepat. Selain itu, diperlukan penyamaan format pelaporan di seluruh kecamatan sehingga proses rekapitulasi menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan perbedaan data. Upaya optimalisasi sistem digital juga perlu terus dikembangkan agar database keluarga lebih terintegrasi dan mempermudah proses pemutakhiran data. Koordinasi antara DP3AKB, pemerintah desa, dan kader lapangan perlu semakin diperkuat agar setiap proses penyampaian data berjalan lancar dan kendala di lapangan dapat segera ditangani.

Sistem arsip dan penyimpanan dokumen juga perlu diperbaiki agar lebih rapi, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Selain itu, penambahan tenaga pendukung pada bidang pengelolaan data menjadi penting mengingat tingginya jumlah laporan yang harus diolah setiap periode. Program magang diharapkan dapat dikembangkan menjadi lebih terstruktur sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih maksimal sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas administrasi di DP3AKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Laporan kinerja BKKBN tahun 2023*. Jakarta: BKKBN.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Laporan pelaksanaan program Bangga Kencana tahun 2024*. Sidoarjo: DP3AKB.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. (2020). *Good governance: Pemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju.